

Pengaruh Kebijakan Pemerintah di Sektor Batik Terhadap Kesejahteraan Pelaku Industri Batik di Kota Pekalongan

The Effect of Batik Sector Policy on the Welfare of The Batik Industry Workers in Pekalongan City

Ricko Ardhian Hermanto¹

Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia

Parfi Khadiyanto²

Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia

Abstrak: Pengembangan sektor industri batik menjadi salah satu fokus kebijakan pemerintah Kota Pekalongan dengan melihat besarnya potensi batik bagi perekonomian Kota Pekalongan. Industri batik di Kota Pekalongan sangat potensial untuk dikembangkan dimana total 70% produksi batik nasional dilakukan di Kota Pekalongan, batik merupakan kekuatan besar bagi perekonomian Kota Pekalongan, batik telah memberikan multiplier efek terhadap aktivitas ekonomi di Kota Pekalongan khususnya perdagangan, perindustrian, jasa, dan pariwisata. Aktivitas ekonomi tersebut merupakan sektor yang menjadi penyokong ekonomi Kota Pekalongan dan memiliki andil besar dalam kondisi kesejahteraan masyarakat Kota Pekalongan terutama para pelaku industri batik. Pengembangan sektor batik juga sangat didukung oleh city branding Kota Pekalongan sebagai World City of Batik dan berbagai event baik yang berskala nasional maupun internasional. Ditambah dengan keberadaan museum batik, pasar grosir batik dan ratusan outlet batik sebagai sarana pemasaran pendukung industri batik di Kota Pekalongan serta banyak industri batik juga tersebar di kampung-kampung batik di penjuru Kota Pekalongan dengan berbagai skala.

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis bagaimana pengaruh kebijakan pemerintah di sektor batik terhadap kesejahteraan pelaku industri batik di Kota Pekalongan, metode yang dilakukan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik analisis deskriptif berdasarkan hasil skoring dan frekuensi. Dari hasil analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Pekalongan di sektor batik dapat memberikan pengaruh terhadap perkembangan sektor batik yang semakin meningkat dan juga dapat mempengaruhi kondisi kesejahteraan pelaku industri batik yang sebagian besar berada pada tingkat kesejahteraan sedang hingga tinggi.

Kata kunci: *Kebijakan, Kesejahteraan; Batik; Pengaruh; Kota Pekalongan.*

Abstract: Batik sector development is one focus of Pekalongan City government policy to see the huge potential of batik for the Pekalongan City economy. Batik industry is very potential to be developed in Pekalongan City which is 70% of the total national batik production performed in here, batik is a major force for the economy of Pekalongan City which has an impact for economic activity especially in trading, industry, service, and tourism. The economic activity of the batik sector who support the Pekalongan City's economy has a big role for the welfare of society especially batik industry workers. Batik sector development is also supported by branding of Pekalongan City as "The World City of Batik" and various events with a national and international scale. With the existence of the batik museum, batik markets, home industry, and all the supporting facilities of the Pekalongan City image as the Batik City.

The purpose of this study to analyze the effect of batik sector policy on the welfare of the batik industry workers in Pekalongan City. The method used is quantitative with descriptive analysis technique based on the results of scoring and frequency. The results of the analysis can be concluded that government policies in batik sector can influence the development of batik sector and can influence the well-being of the batik industry workers in Pekalongan City to becoming increasingly better than before, which largely has been at moderate and high level of welfare.

Keywords: *Policy; Welfare; Batik; Effect; Pekalongan City.*

¹ Ricko Ardhian Hermanto: Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia
Email: rickoardhi@gmail.com

² Parfi Khadiyanto: Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia
Email: parfikh@gmail.com

Pendahuluan

Kota Pekalongan dikenal sebagai “Kota Batik”, menurut Surat Keputusan Walikota Pekalongan No.530/216 Tahun 2006 tentang produk unggulan Kota Pekalongan, menetapkan bahwa produk unggulan Kota Pekalongan adalah komoditas batik, konveksi, pertenunan alat tenun bukan mesin (ATBM), kerajinan enceng gondok, serat alam, dan pertenunan mesin, hal ini dikarenakan Kota Pekalongan mempunyai potensi besar dalam sektor industri batik dan telah berkembang begitu pesat, baik dalam skala kecil maupun besar, hasil produksi batik Pekalongan juga menjadi salah satu penopang perekonomian Kota Pekalongan. Industri batik di Kota Pekalongan menjadi sangat potensial untuk dikembangkan karena total 70% produksi batik nasional dilakukan di Kota Pekalongan, batik merupakan kekuatan besar bagi perekonomian Kota Pekalongan, batik telah memberikan multiplier efek terhadap aktivitas ekonomi di Kota Pekalongan khususnya perdagangan, perindustrian, jasa, dan pariwisata. Aktivitas ekonomi tersebut merupakan sektor yang menjadi penyokong ekonomi Kota Pekalongan dan memiliki andil besar dalam penerimaan pendapatan asli daerah, pengembangan sektor batik juga sangat didukung oleh berbagai event baik yang berskala nasional maupun internasional, keberadaan museum batik, pasar grosir batik, dan ratusan outlet batik sebagai sarana pemasaran pendukung industri batik di Kota Pekalongan. Banyak industri batik juga tersebar di kampung-kampung batik di penjuruan Kota Pekalongan dengan berbagai skala baik skala rumah tangga kecil hingga industri skala besar.

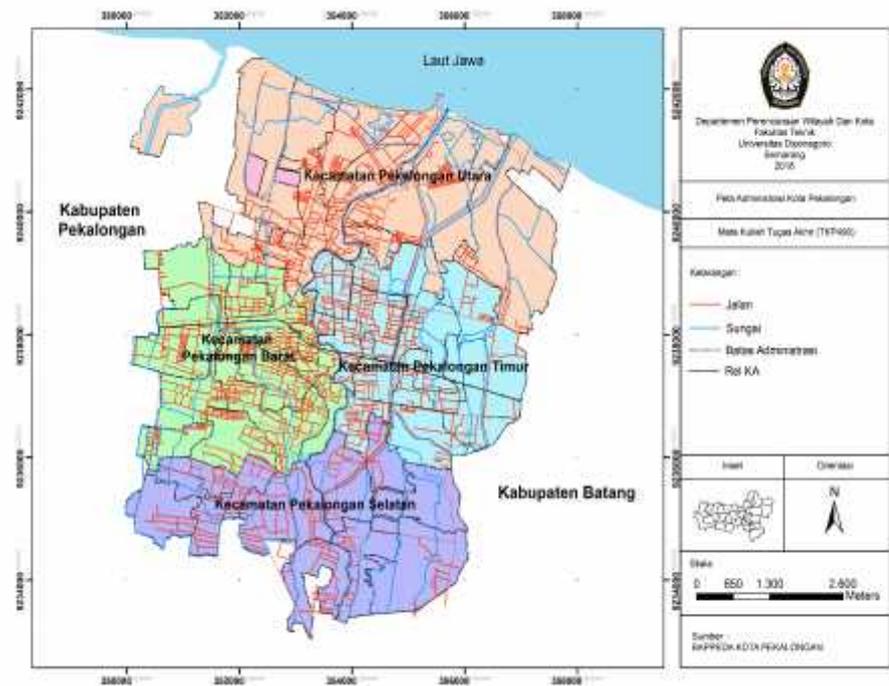
Selain menjadi fokus kebijakan pemerintah potensi pengembangan industri batik tersebut juga menginspirasi dan menjadi dasar penciptaan *branding* Kota Pekalongan dengan *tagline* “Pekalongan World City of Batik” pada saat ulang tahun kota ke 105 tanggal 1 April 2011. Penciptaan *branding* Kota Pekalongan merupakan langkah strategis walikota dr. HM Basyir Ahmad di masa jabatan keduanya (2010-2015) untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui produk unggulan kotanya, kebijakan ini kemudian dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota (RPJM 2010-2015). Munculnya kebijakan ini dilatarbelakangi dari kesadaran pemerintah terhadap persaingan antar kota yang semakin ketat dalam menarik perhatian investor, SDM potensial, dan wisatawan. Dalam hal implementasi, program yang dilakukan dalam rangka pemasaran, pelestarian, dukungan, dan peningkatan produktivitas batik sebagai *branding* Kota Pekalongan telah berjalan sinergis dengan program strategi yang ditetapkan dalam RPJPD, RPJMD, RTRW, dan Renstra SKPD Kota Pekalongan.

Dengan adanya fokus kebijakan pemerintah pada pengembangan sektor industri batik mampu memberikan pengaruh positif bagi sektor tersebut, yang pada akhirnya akan memberikan pengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat dan perekonomian Kota Pekalongan dengan batik sebagai penggerak ekonomi utama.

Penelitian ini sebagai kajian lebih lanjut untuk melihat apakah strategi pengembangan industri batik sebagai produk unggulan utama di Kota Pekalongan seperti yang tertuang dalam RPJPD Kota Pekalongan 2005-2025, RTRW Kota Pekalongan 2009-2029 dan RPJM Kota Pekalongan 2010-2015 sesuai SK Walikota Pekalongan No. 530/216 Tahun 2006 berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat Kota Pekalongan khususnya mereka para pelaku industri batik tersebut, karena saat terjadi penurunan nilai produksi batik angka kemiskinan di Kota Pekalongan juga cenderung meningkat pada data ditahun yang sama. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan “Bagaimana Pengaruh Kebijakan Pemerintah di Sektor Batik Terhadap Kesejahteraan Pelaku Industri Batik di Kota Pekalongan?”.

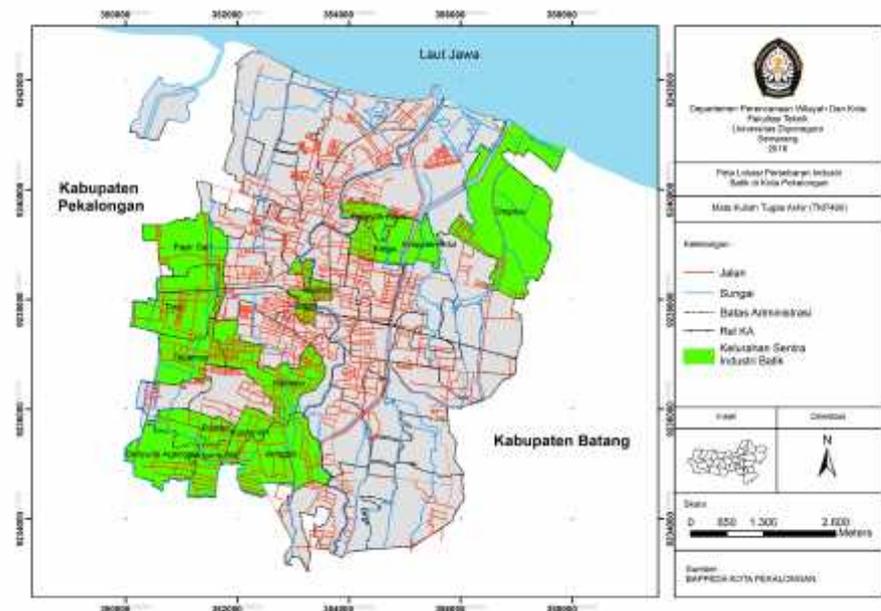
Berikut di bawah ini adalah peta wilayah studi penelitian yaitu Kota Pekalongan dengan batas-batas administrasi sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Laut Jawa
Sebelah Barat	: Kabupaten Pekalongan
Sebelah Timur	: Kabupaten Batang
Sebelah Selatan	: Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan



Gambar 1. Peta Kota Pekalongan

Berikutnya dibawah ini adalah peta lokasi persebaran Kelurahan sentra industri batik di Kota Pekalongan, dimana terdapat 16 kelurahan di Kota Pekalongan menjadi sentra produksi industri batik dari total 47 Kelurahan yang ada di Kota Pekalongan, yang menunjukkan cukup besarnya pengaruh industri batik terhadap perekonomian masyarakat Kota Pekalongan:



Gambar 2. Peta Persebaran Lokasi Industri Batik di Kota Pekalongan

Kajian Literatur

Kesejahteraan

Kesejahteraan merupakan suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak bagi masyarakat, sehingga mampu mengembangkan diri dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya, kesejahteraan merupakan suatu hal yang bersifat subjektif, sehingga setiap keluarga atau individu di dalamnya memiliki pedoman, tujuan, dan cara hidup yang berbeda yang akan memberikan nilai berbeda tentang faktor-faktor yang menentukan tingkat kesejahteraan (BKKBN 1992, dalam Nuryani 2007).

Kriteria masyarakat sejahtera yang biasa digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat menurut BPS (2005) menggunakan delapan indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan, yaitu pendapatan, konsumsi atau pengeluaran keluarga, keadaan tempat tinggal, fasilitas tempat tinggal, kesehatan anggota keluarga, kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan, kemudahan memasukkan anak kejenjang pendidikan, dan kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi.

- 1) Indikator pendapatan digolongkan menjadi 3 item yaitu:
 - a. Tinggi (> Rp. 5.000.000)
 - b. Sedang (Rp. 2.000.000-5.000.000)
 - c. Rendah (< Rp. 2.000.000)
- 2) Indikator pengeluaran digolongkan menjadi 3 item yaitu:
 - a. Tinggi (> Rp. 5.000.000)
 - b. Sedang (Rp. 2.000.000 – Rp. 5.000.000)
 - c. Rendah (< Rp. 2.000.000)
- 3) Indikator tempat tinggal yang dinilai ada 5 item yaitu jenis atap rumah, dinding, status kepemilikan rumah, lantai dan luas lantai. Dari 5 item tersebut kemudian akan digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu:
 - a. Permanen
Kriteria permanen ditentukan oleh kualitas dinding, atap dan lantai. Bangunan rumah permanen adalah rumah yang dindingnya terbuat dari tembok/kayu kualitas tinggi, lantai terbuat dari ubin/keramik/kayu kualitas tinggi dan atapnya terbuat dari seng/genteng/sirap/asbes (BPS, 2012).
 - b. Semi Permanen
Rumah semi permanen adalah rumah yang dindingnya setengah tembok/bata tanpa plaster/kayu kualitas rendah, lantainya dari ubin/semen/kayu kualitas rendah dan atapnya seng/genteng/sirap/asbes (BPS, 2012).
 - c. Non Permaen
Sedangkan rumah tidak permanen adalah rumah yang dindingnya sangat sederhana (bambu/papan/daun) lantainya dari tanah dan atapnya dari daun-daunan atau atap campuran genteng/seng bekas dan sejenisnya (BPS, 2012).
- 4) Indikator fasilitas tempat tinggal yang dinilai terdiri dari 12 item, yaitu pekarangan, alat elektronik, pendingin, penerangan, kendaraan yang dimiliki, bahan bakar untuk memasak, sumber air bersih, fasilitas air minum, cara memperoleh air minum, sumber air minum, fasilitas MCK, dan jarak MCK dari rumah. Dari 12 item tersebut kemudian akan digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu:
 - a. Lengkap
 - b. Cukup
 - c. Kurang
- 5) Indikator kesehatan anggota keluarga digolongkan menjadi 3 item yaitu:
 - a. Bagus (< 25% sering sakit)
 - b. Cukup (25% - 50% sering sakit)
 - c. Kurang (> 50% sering sakit)
- 6) Indikator kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan terdiri dari 5 item yaitu jarak rumah sakit terdekat, jarak toko obat, penanganan obat-obatan, harga obat-obatan, dan alat kontrasepsi. Dari 5 item tersebut kemudian akan digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu:
 - a. Mudah

- b. Cukup
 - c. Sulit
- 7) Indikator kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan terdiri dari 3 item yaitu biaya sekolah, jarak ke sekolah, dan proses penerimaan. Dari 3 item tersebut kemudian akan digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu:
 - a. Mudah
 - b. Cukup
 - c. Sulit
 - 8) Indikator kemudahan mendapatkan transportasi terdiri 3 item, yaitu ongkos kendaraan, fasilitas kendaraan, dan status kepemilikan kendaraan. Dari 3 item tersebut kemudian akan di digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu:
 - a. Mudah
 - b. Cukup
 - c. Sulit

Dari indikator diatas kemudian dilakukan skoring menggunakan Skala Likert, golongan indikator yang lebih baik diberi skor 3 kemudian golongan sedang diberi skor 2 dan golongan buruk diberi skor 1. Menurut Sugiharto (2006) Kriteria untuk masing-masing klasifikasi sebagai berikut :

- Tingkat kesejahteraan tinggi : nilai skor 20-24
- Tingkat kesejahteraan sedang : nilai skor 14-19
- Tingkat kesejahteraan rendah : nilai skor 8-13

Batik

Menurut Irwan Tirta (1996) pengertian batik adalah teknik menghias kain atau tekstil dengan menggunakan lilin dalam proses pencelupan warna, yang semua proses tersebut menggunakan tangan. Selain itu menurut Santosa Doellah, batik adalah sehelai kain yang dibuat secara tradisional dan terutama juga digunakan dalam matra tradisional, memiliki beragam corak hias dan pola tertentu yang pembuatannya menggunakan teknik celup rintang dengan lilin batik sebagai bahan perintang warna. Oleh karena itu, suatu kain dapat disebut batik apabila mengandung dua unsur pokok, yaitu jika memiliki teknik celup rintang yang menggunakan lilin sebagai perintang warna dan pola yang beragam hias khas batik. Batik sudah ada di Pekalongan sekitar tahun 1800. Bahkan menurut data yang tercatat di Disperindagkop UMKM Kota Pekalongan, motif batik ada yang dibuat sejak tahun 1802 seperti motif pohon kecil dalam media berupa bahan baju. Namun, perkembangan yang signifikan diperkirakan terjadi setelah perang besar pada tahun 1825-1830 di kerajaan Mataram yang sering disebut dengan perang Diponegoro atau perang Jawa. Dengan terjadinya peperangan ini mendesak keluarga kraton serta para pengikutnya banyak yang meninggalkan daerah kerajaan. Mereka kemudian tersebar ke arah Timur dan Barat. Batik merupakan komoditas unggulan utama Kota Pekalongan. Hal itu ditunjukkan dengan jumlah unit usaha mencapai 1077 unit pada tahun 2015 meningkat sangat pesat dari sebelumnya sebanyak 632 unit pada tahun 2011, paling tinggi dari pada sektor komoditas unggulan lain. Unit usaha batik juga dapat menyerap tenaga kerja paling banyak dibandingkan komoditas unggulan lain, yaitu sebesar 12.690 jiwa pada tahun 2015 dari sebelumnya pada tahun 2011 sebanyak 9841 jiwa.

Kebijakan

Thomas R. Dye, mengatakan bahwa pengertian kebijakan publik merupakan segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil berbeda, disamping itu Carl Frederich mengatakan bahwa pengertian kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada, dan menurut David Easton pengertian kebijakan publik merupakan pengaruh dan aktivitas pemerintah.

Kebijakan pemerintah Kota Pekalongan mengenai pengembangan industri batik cukup beragam dalam konteks ruang lingkup maupun jangka waktu dari kebijakan tersebut, dengan melihat potensi industri batik di Kota Pekalongan dan

tren perkembangan batik yang *booming* belakangan ini dan telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia, melalui Surat Keputusan Walikota Pekalongan No. 530/216 Tahun 2006 tentang produk unggulan Kota Pekalongan, menetapkan bahwa produk unggulan Kota Pekalongan adalah komoditas batik, konveksi, pertenunan alat tenun bukan mesin (ATBM), kerajinan enceng gondok, serat alam dan pertenunan mesin.

Dari surat keputusan tersebut kemudian dicanangkan *branding* Kota Pekalongan sebagai *World City of Batik* untuk semakin menegaskan Kota Pekalongan sebagai kota batik yang telah dikenal sebelumnya dan sebagai dasar bagi arahan pengembangan kebijakan Kota Pekalongan untuk mendukung potensi industri batik. Kemudian sebagai tindak lanjut dibuatlah dokumen kebijakan berupa Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pengembangan jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan 2005-2025 dengan Visi Pembangunan Kota Pekalongan Tahun 2005-2025 yaitu "PEKALONGAN KOTA BATIK YANG MAJU, MANDIRI, DAN SEJAHTERA", Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Pekalongan 2009-2029 yang menjadikan batik sebagai salah satu sektor yang dikembangkan demi terwujudnya tujuan strategis Kota Pekalongan sebagai Kota Mina Batik. Pengembangan sektor batik juga dirumuskan dalam Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang RPJMD Kota Pekalongan 2010-2015 dengan visi "Terwujudnya Kota Jasa Yang Berwawasan Lingkungan Menuju Masyarakat Madani Berbasis Nilai-Nilai Religiusitas" dimana dalam penjabarannya, Pekalongan sebagai kota jasa adalah memperkuat *branding World City of Batik*, menjadikan sektor batik untuk membangun masyarakat wirausaha-jasa berbasis batik sebagai potensi terunggul-terunik Kota Pekalongan saat ini. Disamping itu adanya event tahunan pekan batik nasional, dan event dua tahunan pekan batik internasional yang diadakan oleh pemerintah Kota Pekalongan serta keberadaan museum batik di Kota Pekalongan juga membantu dalam hal promosi dan pemasaran Batik Pekalongan.

Hasil Analisis

Hasil analisis dari penelitian Pengaruh Kebijakan Pemerintah di Sektor Batik Terhadap Kesejahteraan Pelaku Industri Batik di Kota Pekalongan yang telah dilakukan, yang pertama identifikasi kebijakan pemerintah Kota Pekalongan tentang pengembangan industri batik, dapat dilihat bahwa kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Pekalongan mendukung perkembangan industri batik mengingat batik sebagai sektor yang potensial sebagai identitas dan produk unggulan utama Kota Pekalongan dengan kontribusi yang cukup besar bagi perekonomian Kota Pekalongan. Kebijakan tersebut yaitu batik sebagai produk unggulan dalam RPJPD Kota Pekalongan 2005-2025, tujuan penataan ruang yang mendukung pengembangan industri batik dalam RTRW Kota Pekalongan 2009-2029, dan visi jangka menengah serta tujuan strategis Kota Pekalongan dalam RPJMD Kota Pekalongan 2010-2015 sebagai Kota MinaBatik. Kebijakan tersebut juga dapat memberikan pengaruh bagi kesejahteraan pelaku industri batik seperti dari hasil analisis pengaruh kebijakan di sektor batik terhadap kesejahteraan pelaku industri batik diperoleh fakta bahwa mayoritas pelaku industri batik yaitu sebesar 83% menyatakan bahwa kebijakan yang dilaksanakan pemerintah mampu mempengaruhi kondisi kesejahteraan mereka dengan nilai signifikansi 0,005 menunjukkan terdapat hubungan yang cukup signifikan antara kedua variabel. Perubahan kondisi kesejahteraan mereka juga telah dinyatakan terjadi pada kurun waktu 5 tahun terakhir, sesuai dengan waktu pelaksanaan tiga kebijakan diatas yaitu pada tahun 2009, 2010, dan 2011 yang pengaruhnya mampu dirasakan dalam 5 tahun terakhir. Kebijakan yang dilaksanakan juga telah mampu memberikan pengaruh pada pelaku industri batik secara menyeluruh, tidak pada kedudukan tertentu saja.

Identifikasi tingkat kesejahteraan pelaku industri batik dilihat dari 8 indikator menurut BPS (2005) yang kemudian diolah dengan teknik skoring yang dijumlahkan sehingga didapat total skor tiap responden lalu diklasifikasikan menurut Sugiharto (2006) didapat hasil analisis sebagian besar pelaku industri batik yaitu sebesar 87% dari total jumlah responden memiliki tingkat kesejahteraan sedang dan sisanya 13% responden memiliki tingkat kesejahteraan tinggi dan tidak ditemukan adanya responden dengan tingkat kesejahteraan rendah.

Selanjutnya setelah dilakukan identifikasi perkembangan industri batik di Kota Pekalongan menunjukkan bahwa perkembangan industri batik di Kota Pekalongan meningkat cukup signifikan dari tahun ke tahun, kondisi tersebut dapat dilihat dari jumlah industri yang ada, jumlah tenaga kerja yang diserap, nilai produksi batik pertahun, dan kapasitas produksi yang dapat dihasilkan. Sektor industri batik juga memiliki kontribusi yang cukup besar bagi struktur perekonomian Kota Pekalongan dilihat dari nilai kontribusi lapangan usaha industri pengolahan terhadap total nilai PDRB Kota Pekalongan yaitu sebesar 21,67%, kontribusi tersebut juga cenderung meningkat persentasenya dari tahun ke tahun meski pada sektor lain angkanya cenderung menurun.

Identifikasi pengaruh industri batik terhadap kesejahteraan dapat dilihat dari beberapa variabel yaitu kedudukan seseorang dalam industri batik, lamanya bekerja, dan perubahan kondisi kesejahteraan seseorang setelah menekuni bidang industri batik. Ditemukan fakta bahwa tingkat kesejahteraan pelaku industri batik ternyata dipengaruhi oleh kedudukan mereka di bidang industri batik, para juragan memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih baik dibandingkan mereka yang memiliki kedudukan sebagai pedagang atau buruh. Namun kondisi kesejahteraan tersebut tidak dipengaruhi oleh lamanya bekerja seseorang di bidang industri batik. Waktu terjadinya perubahan kondisi kesejahteraan juga dapat disimpulkan yaitu pada kurun waktu 5 tahun terakhir.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dalam penelitian Pengaruh Kebijakan Pemerintah di Sektor Batik Terhadap Tingkat Kesejahteraan Pelaku Industri Batik di Kota Pekalongan menunjukkan bahwa kebijakan yang dilaksanakan pemerintah Kota Pekalongan di sektor batik dapat mempengaruhi kondisi tingkat kesejahteraan pelakunya menjadi lebih baik setelah kebijakan tersebut dilaksanakan, dengan mayoritas pelaku industri batik telah berada pada kondisi tingkat kesejahteraan sedang hingga tingkat kesejahteraan tinggi. Kebijakan pemerintah di sektor batik dapat mempengaruhi kondisi kesejahteraan pelaku industri batik di Kota Pekalongan secara signifikan, didukung dengan jawaban dari 100 responden yang 83 orang diantaranya menyatakan bahwa kebijakan pemerintah mempengaruhi kesejahteraan mereka berbanding 17 orang yang menyatakan tidak. Sebagian besar responden juga menyatakan bahwa kondisi kesejahteraan mereka lebih baik sekarang dibandingkan dulu, perubahan kondisi kesejahteraan menjadi lebih baik terjadi pada jangka waktu 5 tahun terakhir sesuai dengan tahun pelaksanaan kebijakan pemerintah Kota Pekalongan tentang pengembangan sektor industri batik. Kebijakan pemerintah di sektor batik juga dapat mempengaruhi perkembangan industri batik di Kota Pekalongan yang terbukti meningkat pesat dalam 5 tahun terakhir, batik yang memiliki potensi besar bagi perekonomian Kota Pekalongan tidak akan berkembang maksimal jika tidak didukung oleh kebijakan pemerintah. Dengan adanya dukungan dari kebijakan pemerintah seperti kemudahan akses pemasaran, promosi dan branding Kota Pekalongan sebagai Kota Batik, serta infrastruktur yang mendukung industri batik dapat memaksimalkan perkembangan sektor industri batik di Kota Pekalongan.

Rekomendasi dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya sehingga dapat menyempurnakan hasil dari penelitian mengenai pengaruh kebijakan pemerintah terhadap kesejahteraan pelaku industri batik di Kota Pekalongan ini. Beberapa diantaranya adalah:

1. Dengan mayoritas pelaku industri batik yang 87% berada pada tingkat kesejahteraan sedang dengan hanya 13% yang berada pada tingkat kesejahteraan tinggi, perlu adanya upaya dari pemerintah agar para pelaku industri batik dengan tingkat kesejahteraan sedang juga dapat meningkat menjadi lebih sejahtera.
2. Perlu adanya evaluasi dalam jangka waktu tertentu dari pemerintah mengenai kebijakan yang dilaksanakan terutama pada sektor industri batik karena kontribusinya yang besar bagi perekonomian Kota Pekalongan, bagaimana pengaruh dari kebijakan tersebut dalam naik turunnya industri batik dan keberlanjutan kebijakan pemerintah untuk terus mendukung perkembangan sektor batik di Kota Pekalongan.

3. Dengan ditemukannya fakta bahwa kesejahteraan dipengaruhi oleh kedudukan pelaku industri batik menunjukkan adanya kesenjangan dimana para juragan jauh lebih sejahtera dibandingkan kedudukan pelaku industri batik lain yaitu pedagang dan buruh, dan para buruh juga lebih rentan terhadap naik turunnya industri batik sehingga perlu adanya perhatian dari pemerintah untuk menjamin keberlangsungan mata pencaharian mereka sehari-hari.

Daftar Pustaka

- BKKBN. 1994. *Pembangunan Keluarga Sejahtera Indonesia Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1992 dan GBHN Tahun 1993*. Jakarta: Kantor Menteri Kependudukan/BKKBN.
- BPS. 2005. *Indikator Kesejahteraan Rakyat*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Kota Pekalongan. 2009. *Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Pekalongan Tahun 2005-2025*. Pekalongan: BAPPEDA.
- Kota Pekalongan. 2010. *Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2010-2015*. Pekalongan: BAPPEDA.
- Kota Pekalongan. 2011. *Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029*. Pekalongan: BAPPEDA.
- Kota Pekalongan. 2015. *Kota Pekalongan Dalam Angka*. Pekalongan: Badan Pusat Statistik Kota Pekalongan.
- Republik Indonesia. 1974. *Undang-undang No.6 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Sekretaris Negara Republik Indonesia.
- Sugiharto, Eko. 2006. *Studi Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan di Kampung Gurimbang Kecamatan Sambalung Kabupaten Berau*. Jurnal Ilmu Perikanan Tropis.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tirta, Iwan. 2009. *Batik, Sebuah Lakon*. Jakarta: Gaya Favorit Press.